

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Di Indonesia, sektor ini menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, berbagai destinasi wisata di Indonesia mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara (Latip Rosyidin et al., 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, aktivitas mencakup berbagai kegiatan masyarakat wisata yang didukung oleh fasilitas serta layanan yang disediakan oleh, pelaku usaha, dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan (Asy'ari et al., 2021). Kontribusi sektor ini tidak hanya terlihat dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa, serta penggerak sektor-sektor pendukungnya, seperti transportasi, perhotelan, restoran, dan industri kreatif (Wibowo et al., 2017).

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 menyatakan bahwa sektor pariwisata Indonesia memberikan kontribusi sekitar 4,3% terhadap PDB, setara dengan Rp842,3 triliun, serta menghasilkan devisa sebesar USD 4,26 miliar. Selain itu, sektor ini menyerap tenaga kerja sebanyak 22,89 juta jiwa, sehingga menjadikannya sebagai sektor yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional (Hasibuan et al., 2023). Data ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata berperan penting dalam menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, serta memberikan dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tujuan tersebut juga mencakup perluasan serta upaya pemerataan lapangan kerja, sekaligus mendukung pembangunan daerah (Husna, 2022).

Berdasarkan data pada BPS Jawa Barat, jumlah wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Bogor mengalami peningkatan signifikan, dari 3,3 juta orang pada tahun 2022 menjadi lebih dari 6,3 juta orang pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Bogor terus berkembang dan memiliki daya tarik yang kuat bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Lonjakan kunjungan wisatawan tersebut secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, termasuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi wisata (Husna, 2022). Sebagai salah satu daerah dengan potensi pariwisata yang besar, Bogor menyajikan berbagai destinasi unggulan, mulai dari wisata alam hingga wisata buatan, yang menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat lokal.

Curug Leuwi Hejo, yang terletak di Kabupaten Bogor, merupakan salah satu destinasi wisata alam yang potensial di Jawa Barat. Dengan julukan "*Green Canyon Bogor*," tempat ini menawarkan keindahan air terjun yang jernih dengan kedalaman bervariasi antara 2-10 meter, suasana alami yang sejuk, dan biaya masuk yang lumayan terjangkau, yaitu Rp 45.000 untuk Curug Leuwi Hejo dan sudah termasuk air terjun lainnya. Keunikan ini menjadikan Curug Leuwi Hejo sebagai daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara (Kurniawan & Muqtabar, 2023).

Curug Leuwi Hejo merupakan destinasi wisata dengan potensi besar, terlihat dari tren peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, meskipun terdampak oleh pandemi COVID-19, Curug Leuwi Hejo berhasil menarik 7.430 wisatawan. Jumlah ini meningkat drastis menjadi 13.870 wisatawan pada tahun 2022, dan kembali naik hingga 20.000 wisatawan pada tahun 2023 (Kurniawan & Muqtabar, 2023). Dengan tren kunjungan yang terus bertumbuh, Curug Leuwi Hejo tidak hanya menjadi salah satu pilihan favorit wisatawan lokal dan internasional, tetapi juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi unggulan yang dapat memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi masyarakat lokal di sekitarnya.

Dalam pengelolaan Curug Leuwi Hejo, masyarakat lokal telah dilibatkan melalui pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT). Mereka berpartisipasi dalam kegiatan seperti pelatihan kebersihan, konservasi lingkungan, dan

pengelolaan usaha kecil seperti penjualan makanan serta menjadi pemandu wisata (Nugraha & Ramdani, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata, seperti membuka usaha kecil berupa penjualan makanan, minuman, serta menyediakan jasa transportasi dan pemandu wisata telah meningkatkan pendapatan lokal (Husna, 2022). Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi, seperti terbukanya lapangan kerja dan peluang usaha baru (Nugraha & Ramdani, 2024). Namun, kenyataannya manfaat ekonomi ini belum dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat (Herlianti & Sanjaya, 2022; Metuduan et al., 2024; Widya Setiyanti & Sadono, 2015). Kesenjangan terlihat dari terbatasnya akses masyarakat terhadap peluang ekonomi di sekitar destinasi wisata, yang lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu, terutama mereka yang memiliki modal dan akses lebih baik.

Kondisi ini terjadi karena dominasi perusahaan multinasional besar dalam industri pariwisata, yang mengakibatkan sebagian besar keuntungan mengalir kepada kelompok berpendapatan tinggi, sementara manfaat yang diterima kelompok berpendapatan rendah seringkali terbatas (Alam & Paramati, 2016). Dalam beberapa kasus, keuntungan dari pariwisata lebih banyak dirasakan oleh rumah tangga berpenghasilan tinggi dibandingkan dengan rumah tangga berpenghasilan rendah, seperti yang terlihat di Galicia, Spanyol. Efek pariwisata terhadap ketimpangan sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi lokal, kehadiran kebijakan redistributif, dan sejauh mana komunitas lokal terlibat dalam penyediaan jasa pariwisata (Zhang & Yang, 2023).

Selain itu, sebagian masyarakat masih mengandalkan pekerjaan di sektor informal yang sering kali menghasilkan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini terjadi karena tidak semua penduduk di sekitar destinasi wisata memiliki pekerjaan tetap, sehingga mereka mengandalkan sektor pariwisata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, banyak di antara mereka yang beralih profesi menjadi pelaku usaha di bidang pariwisata sebagai sumber penghidupan utama (Herlianti & Sanjaya, 2022). Kurangnya dukungan pemerintah dan terbatasnya program pengembangan ekonomi lokal telah menjadi tantangan yang menghambat pemerataan manfaat ekonomi. Dengan demikian,

meskipun pariwisata memberikan kontribusi ekonomi yang penting, upaya untuk meningkatkan inklusivitas dan keberlanjutan ekonomi masyarakat di sekitar destinasi masih sangat diperlukan.

Ketidaksetaraan akses yang dimiliki masyarakat juga dapat memengaruhi bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat dari adanya kegiatan pariwisata (Kurniawan, 2020). Contohnya masyarakat yang memiliki akses ke pengelolaan langsung, seperti operator parkir atau pengelola tiket masuk, mendapatkan penghasilan yang lebih stabil dan signifikan. Sebaliknya, masyarakat yang hanya bergantung pada penjualan makanan dan minuman, atau pemandu wisata, sering kali harus menghadapi persaingan yang ketat dengan sesama pedagang lokal dan tergantung pada fluktuasi kunjungan wisatawan (Suharti et al., 2016). Ketimpangan ini semakin mencolok ketika pengelolaan destinasi didominasi oleh pihak luar yang memiliki kontrol lebih besar atas aset-aset utama destinasi wisata. Akibatnya, masyarakat lokal yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya utama hanya mendapatkan manfaat ekonomi yang terbatas meskipun mereka berperan langsung dalam mendukung keberlanjutan destinasi wisata (Nugraha & Ramdani, 2024).

Pemahaman terhadap fenomena ketimpangan akses yang dimiliki masyarakat dapat diperoleh melalui penerapan teori akses yang dikembangkan oleh Ribot dan Peluso (2003). Teori ini menyatakan bahwa akses terhadap sumber daya, termasuk sumber daya pariwisata, tidak hanya bergantung pada hak legal atau penguasaan fisik atas sumber daya tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial, kekuasaan, dan kebijakan yang ada di masyarakat (Ribot & Peluso, 2003). Dalam konteks Curug Leuwi Hejo, masyarakat lokal sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi yang dihasilkan dari pariwisata (Nugraha & Ramdani, 2024). Sumber daya tersebut lebih sering diakses oleh pengelola wisata besar, pihak ketiga, atau investor yang memiliki modal, jaringan sosial, dan hubungan kekuasaan yang lebih kuat.

Masyarakat lokal yang tidak memiliki jaringan atau keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis sering kali terpinggirkan dalam proses pengelolaan. Seperti yang dijelaskan oleh Naufal (2019), dalam banyak kasus, aktor-aktor yang memiliki kekuasaan lebih besar dalam pengelolaan pariwisata,

baik dari segi modal maupun struktur sosial, seringkali mendapatkan lebih banyak manfaat ekonomi daripada masyarakat lokal. Relasi kekuasaan ini tercermin dalam distribusi keuntungan yang tidak seimbang, di mana pengelola wisata besar dan investor sering kali memperoleh sebagian besar keuntungan, sementara masyarakat lokal hanya mendapatkan manfaat yang terbatas dari sektor pariwisata.

Melihat fenomena ketimpangan distribusi manfaat ekonomi ini, penting untuk melakukan penelitian yang mengkaji secara mendalam terkait mekanisme akses masyarakat lokal terhadap sumber daya pariwisata di Curug Leuwi Hejo. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi, mengingat ketimpangan yang terjadi dalam pengelolaan pariwisata dapat memperburuk kesenjangan ekonomi di tingkat lokal (Husna, 2022). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan model pengelolaan pariwisata yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana masyarakat lokal dapat lebih terlibat dalam setiap aspek pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal dan menjaga keberlanjutan lingkungan yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan (Nugraha & Ramdani, 2024).

Dengan melihat berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal di sekitar Curug Leuwi Hejo, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi dalam ranah akademik, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang dapat digunakan oleh pengelola wisata dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan mengidentifikasi mekanisme akses yang ada dan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data, penelitian ini berpotensi untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal, dengan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pengelolaan pariwisata, dan mengurangi ketimpangan yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh mekanisme akses masyarakat terhadap sektor pariwisata di Curug Leuwi Hejo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Curug Leuwi Hejo memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, namun distribusi manfaat ekonominya belum merata. Ketimpangan ini diduga dipengaruhi oleh perbedaan aksesibilitas masyarakat terhadap peluang ekonomi di sektor pariwisata. Oleh karena itu, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat akses masyarakat lokal terhadap peluang ekonomi di sektor pariwisata Curug Leuwi Hejo?
2. Seberapa besar distribusi manfaat sosial ekonomi yang diterima oleh masyarakat lokal dari sektor pariwisata di Curug Leuwi Hejo?
3. Seberapa besar pengaruh aksesibilitas masyarakat lokal terhadap distribusi manfaat sosial ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata di Curug Leuwi Hejo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat akses masyarakat lokal terhadap peluang ekonomi di sektor pariwisata Curug Leuwi Hejo.
2. Untuk mengetahui seberapa besar distribusi manfaat sosial ekonomi yang diterima oleh masyarakat lokal dari sektor pariwisata di Curug Leuwi Hejo.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh aksesibilitas masyarakat lokal terhadap distribusi manfaat sosial ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata di Curug Leuwi Hejo.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, khususnya di bidang sosiologi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. Peneliti berharap temuan dari penelitian ini bisa menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa dan

akademisi, serta membantu memperluas wawasan mereka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya pengembangan kebijakan dan strategi yang mendorong perubahan positif di masyarakat, terutama dalam konteks pariwisata berbasis komunitas di era digital saat ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat dan Pengelola Curug Leuwi Hejo, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat lokal dan pengelola Curug Leuwi Hejo dalam merancang kebijakan dan strategi yang lebih inklusif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi pariwisata serta memastikan distribusi manfaat yang lebih merata.
- b. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pengaruh aksesibilitas terhadap distribusi manfaat ekonomi di sektor pariwisata, memperkaya pemahaman peneliti terkait isu-isu pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pariwisata.
- c. Bagi Umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak terkait, seperti pemerintah dan lembaga non-pemerintah, dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata.

E. Kerangka Berpikir

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan (UU No. 10 Tahun 2009). Dalam konteks ekonomi, sektor pariwisata tidak hanya berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa, dan menggerakkan sektor-sektor pendukung seperti transportasi, perhotelan, restoran, dan industri kreatif (Latip Rosyidin et al., 2024). Namun, manfaat yang dihasilkan oleh sektor ini sering kali tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal, khususnya mereka yang tinggal di sekitar destinasi wisata.

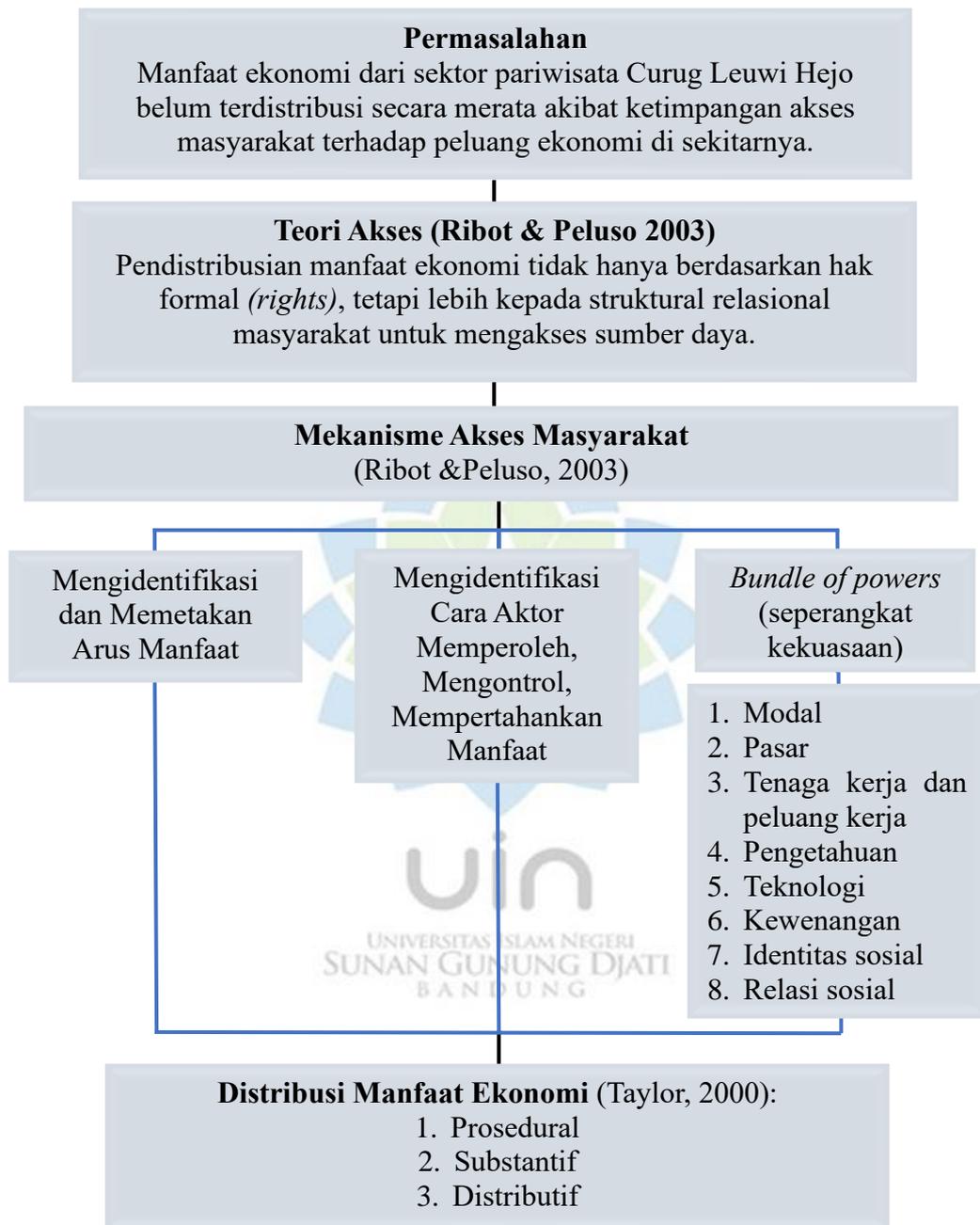
Curug Leuwi Hejo, salah satu destinasi wisata alam di Kabupaten Bogor,

menunjukkan potensi besar dalam menarik wisatawan. Berdasarkan data dari Tabel 1.2, jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi ini meningkat dari 7.430 orang pada tahun 2021 menjadi 20.000 orang pada tahun 2023 (Kurniawan & Muqtabar, 2023). Meskipun demikian, distribusi manfaat ekonomi dari pariwisata belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lokal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait faktor aksesibilitas masyarakat terhadap peluang ekonomi yang ada.

Menurut teori akses yang dikemukakan oleh Ribot dan Peluso (2003), akses terhadap sumber daya, termasuk manfaat ekonomi dari pariwisata, tidak hanya bergantung pada kepemilikan legal atau fisik atas sumber daya, tetapi juga pada kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Akses ini dipengaruhi oleh hubungan sosial, kekuasaan, kebijakan, dan faktor-faktor lain yang menentukan siapa yang dapat memperoleh manfaat dan sejauh mana mereka dapat memanfaatkan peluang tersebut. Ribot & Peluso menjelaskan bahwa untuk dapat memperoleh, mengontrol, dan mempertahankan akses terhadap sumber daya, diperlukan sekumpulan kekuasaan (*Bundle of powers*) (Ribot & Peluso, 2003). Kekuasaan ini mencakup berbagai aspek seperti modal, pasar, tenaga kerja dan peluang kerja, pengetahuan, teknologi, kewenangan, identitas sosial, serta relasi sosial.

Dalam kasus Curug Leuwi Hejo, masyarakat lokal sering kali menghadapi keterbatasan dalam aksesibilitas, yang menghalangi mereka untuk sepenuhnya mendapatkan manfaat ekonomi dari pariwisata. Selain itu, teori ini melihat bahwa akses merupakan hal yang dinamis karena dipengaruhi dinamika kekuasaan dan hubungan sosial yang terus berubah. Hal ini sejalan dengan sektor pariwisata berbasis komunitas, di mana keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata menjadi kunci untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil.

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



F. Hipotesis

H₀ = Aksesibilitas Masyarakat Lokal tidak berpengaruh terhadap Distribusi Manfaat Ekonomi di Sektor Pariwisata di Curug Leuwi Hejo.

H₁ = Aksesibilitas Masyarakat Lokal berpengaruh terhadap Distribusi Manfaat Ekonomi di Sektor Pariwisata di Curug Leuwi Hejo.